

# **KLIPPING BERITA MEDIA MASSA**



**Sabtu-Senin, 25-27 Agustus 2018**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

## **KATA PENGANTAR**

Kliping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Investor Daily (Halaman, 6)	Senin, 27 Agustus 2018	Tol Manado Dukung Pengembangan KEK Bitung	Pembangunan jalan tol Manado – Bitung sepanjang 39 kilometer dinilai dapat mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Bitung.
2	Investor Daily (Halaman, 6)	Senin, 27 Agustus 2018	Tol Malang – Pandaan 40 Km Rampung Desember	Pengerjaan jalan tol ruas Malang – Pandaan di Jawa Timur sepanjang 40 kilometer (km) ditargetkan tuntas pada akhir Desember 2018.
3	Investor Daily (Halaman, 6)	Senin, 27 Agustus 2018	Groundbreaking Patimban Tunggu Pembebasan Lahan	Pemerintah masih menunggu proses pembebasan tanah tuntas sebelum melaksanakan groundbreaking proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat
4	Kompas (Halaman Utama)	Senin, 27 Agustus 2018	Sanitasi Masih Bermasalah	Masa tanggap darurat gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, berakhir hari Sabtu. Saat ini beralih menjadi fase transisi darurat ke pemulihan.
5	Kompas (Halaman, 6)	Senin, 27 Agustus 2018	Pendanaan Infrastruktur	Para pemudik lebaran tahun ini telah merasakan adanya perbaikan kondisi jalan tol yang dapat mengurangi (belum mengeliminasi) penderitaan macet selama perjalanan.
6	Kompas (Halaman, 14)	Senin, 27 Agustus 2018	Bangun Rumah Tahan Gempa	Penanganan dampak gempa bumi di Lombok memasuki tahap pemulihan. Saatnya warga di kawasan itu mendirikan rumah yang lebih kuat dengan teknik konstruksi tahan gempa.
7	Kompas (Halaman, 13)	Sabtu, 25 Agustus 2018	Aturan Hunian Direvisi	Pemerintah memutuskan untuk merevisi peraturan tentang hunian berimbang.
8	Kompas (Halaman, 13)	Sabtu, 25 Agustus 2018	Membangun Rumah, Membangun Bangsa	Memperingati Hari Perumahan Nasional, 25 Agustus, sejenak merenungkan soal pemenuhan perumahan di Indonesia.
9	Media Indonesia (Halaman, 17)	Sabtu, 25 Agustus 2018	Ekonomi Wisata Menggeliat	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Purbalingga, Jawa Tengah menargetkan mampu menyedot pendapatan dari sektor pariwisata objek wisata Gua Lawa Purbalingga
10	Investor Daily (Halaman, 6)	Sabtu- Minggu, 25-26 Agustus 2018	Desember Jembatan Holtekamp akan Beroperasi	Menteri BUMN menyatakan bahwa jembatan Holtekamp di Papua diharapkan sudah dapat beroperasi pada Desember 2018.
11	Investor Daily (Halaman, 6)	Sabtu- Minggu, 25-26 Agustus 2018	Berita Foto	Jalan Layang Tol
12	Koran Tempo (Halaman, 5)	Sabtu- Minggu, 25-26 Agustus 2018	Pendataan Rumah di Lombok Barat Rampung pada September	Pemerintah kabupaten Lombok Barat menargetkan pendataan rumah yang rusak rampung pada 25 September mendatang
13	Kompas (Halaman, 18)	Senin, 27 Agustus 2018	Aturan Hunian Direvisi	Pembangunan hunian berimbang akan direvisi menjadi boleh berbeda kabupaten atau kota bahkan provinsi.

Judul	<b>Tol Manado Dukung Pengembangan KEK Bitung</b>	Tanggal	Senin, 27 Agustus 2018
Media	Investor Daily (Halaman, 6)		
Resume	Pembangunan jalan tol Manado – Bitung sepanjang 39 kilometer dinilai dapat mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Bitung.		

# Tol Manado Dukung Pengembangan KEK Bitung

JAKARTA – Pembangunan jalan tol Manado-Bitung sepanjang 39 kilometer dinilai dapat mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Bitung. Hal itu karena jalan bebas hambatan tersebut akan menghubungkan KEK Bitung dan Kota Manado sehingga dapat menumbuhkan ekonomi.

"Dengan adanya sinergi antara Jalan Tol Manado-Bitung, KEK dan juga Pelabuhan Hub Internasional ini diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan Manado dan sekitarnya serta membawa kesejahteraan bagi kita semua," tambah utgkap Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Refly Harun dalam siaran tertulisnya di Jakarta, Minggu (26/8).

Selain itu, sambungnya, hadirnya jalan tol yang dibangun oleh PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) tersebut dapat memangkas waktu tempuh kota Manado ke Kota Bitung atau sebaliknya. Dengan demikian, ketersediaan infrastruktur ini juga dapat memangkas biaya logistik secara signifikan saat tol dioperasikan.

"Jalan Tol Manado-Bitung ini

sangat ditunggu oleh masyarakat karena dampaknya yang sangat positif. Distribusi barang antara Kota Manado dan Kota Bitung yang semula menghabiskan satu hingga dua jam, nantinya dapat ditempuh hanya dalam waktu empat puluh lima menit," ujar Refly Harun.

Jalan Tol Manado-Bitung memiliki panjang 39 Km yang terbagi menjadi empat seksi, yaitu Seksi 1A Manado-Sukur sepanjang 7 km, Seksi 1B Sukur-Air Madidi sepanjang 7 km, seksi 2A Airmadidi-Danowudu sepanjang 11,5 km dan Seksi 2B Danowudu-Bitung sepanjang 13,5 km. PT JMB melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk seksi 2A dan 2B dengan total panjang 25 km pada pembangunan jalan tol pertama di Sulawesi Utara ini, sedangkan sisanya dibangun oleh pemerintah.

Direktur Utama PT JMB George IMP Manurung mengatakan, hingga akhir Agustus, kemajuan konstruksi Jalan Tol Manado-Bitung untuk Seksi 2A (Airmadidi-Danowudu) telah mencapai 60,18% dan Seksi 2B (Danowudu-Bitung) mencapai 6,22%. Sementara itu, pengadaan lahan untuk jalan utama yang

dikelola oleh PT JMB pada Seksi 2A (Airmadidi-Danowudu) sebesar 98,88% dan Seksi 2B (Danowudu-Bitung) sebesar 72,50%. Kedua seksi tersebut ditargetkan untuk beroperasi pada tahun 2019.

"Kami optimis dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Permasalahan utama masih pada pembebasan lahan, terutama pada Seksi 2B. Segala upaya percepatan pembebasan lahan terus kami upayakan dan secara aktif terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait," ujar George.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan salah satu kendala pembangunan infrastruktur Jalan Tol Manado-Bitung adalah pembebasan lahan, yakni pemilik tanah belum bersedia menerima uang ganti rugi.

"Pembangunan infrastruktur tidak optimal akibat pembebasan lahan yang belum tuntas. Nah, itu yang terus kami upayakan sehingga proses pembangunannya tidak terhambat," kata Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw di Manado beberapa waktu lalu. (ean)

Judul	Tol Malang – Pandaan 40 Km Rampung Desember	Tanggal	Senin, 27 Agustus 2018
Media	Investor Daily (Halaman, 6)		
Resume	Pengerjaan jalan tol ruas Malang – Pandaan di Jawa Timur sepanjang 40 kilometer (km) ditargetkan tuntas pada akhir Desember 2018.		

# Tol Malang-Pandaan 40 Km Rampung Desember

MALANG – Pengerjaan jalan tol ruas Malang-Pandaan di Jawa Timur sepanjang 40 kilometer (km) ditargetkan tuntas pada akhir Desember 2018. Sekadar informasi, total jalan tol yang dioperasikan hingga Juli lalu telah mencapai 111 km dari rencana pengoperasian jalan bebas hambatan tahun ini sepanjang 908,8 km.

"Sekarang pembangunannya (progres) lebih dari 60%, bahkan tinggal penyelesaian, mudah-mudahan lancar," Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di sela peninjauan pembangunan rusunawa tahap 3 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di kawasan RS UMM di Malang, Sabtu (25/8).

Menteri PUPR meyakini pada akhir tahun ini pembangunan tol Malang-Pandaan bakal tuntas 100% dan bisa segera dioperasikan. Meski pembangunan belum tuntas seluruhnya, jalan tol

Malang-Pandaan ruas Singosari hingga Karanglo sudah difungsikan pada saat mudik Lebaran tahun ini. Jalan tol Malang-Pandaan yang pembangunannya berakhir di Cemorokandang, Kota Malang, bakal dilanjutkan hingga Kepanjen. Sedangkan yang di Karanglo akan dilanjutkan hingga Kota Batu.

Menyinggung rencana pembangunan jalan tol tengah di Kota Malang yang digagas Plt Wali Kota Malang Sutiaji belum lama ini, Basuki menyatakan harus ada kajian mendalam terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

"Persetujuannya tergantung apakah amdalnya memungkinkan atau tidak, sehingga harus ada kajian mendalam dan lebih detail. Untuk pendanaan bisa menggali dari berbagai sektor, termasuk menghadirkan para investor," ucap dia, seperti dilansir *Antara*.

Selain investor, lanjut dia, bisa menggunakan skema kerja sama

pemerintah dan badan usaha (KPBU). "Untuk dana pembangunan, kami lihat dulu *internal rate of return* (IRR)-nya juga, kalau memang kurang, nanti kami bantu," katanya.

Pekan lalu, Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto juga mengungkapkan bahwa pengoperasian jalan tol Pejagan-Pemalang seksi 3 dan 4 sepanjang 37,3 kilometer (km) masih menunggu jadwal peresmian dari Presiden Joko Widodo. Pasalnya, ruas tol yang dikelola oleh PT Pejagan Pemalang Toll Road itu telah selesai uji kelayakan dan operasionalnya sejak Juli 2018.

"Kami sudah mengirim surat ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk izin pengoperasiannya. Apalagi, konstruksi sudah selesai 100%. Namun, pengoperasiannya masih menunggu waktu dan jadwal dari Presiden Joko Widodo," ungkap Herwidiakto kepada *Investor Daily* pekan lalu. (tm)

Judul	Groundbreaking Patimban Tunggu Pembebasan Lahan	Tanggal	Senin, 27 Agustus 2018
Media	Investor Daily (Halaman, 6)		
Resume	Pemerintah masih menunggu proses pembebasan tanah tuntas sebelum melaksanakan groundbreaking proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat		

# Groundbreaking Patimban Tunggu Pembebasan Lahan

JAKARTA – Pemerintah masih menunggu proses pembebasan tanah tuntas sebelum melaksanakan *groundbreaking* proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Karena itu, proses pembebasan tanah ditargetkan segera selesai dalam waktu dekat ini.

"Untuk pelaksanaan *groundbreaking* Pelabuhan Patimban, masih menunggu proses (pembebasan) tanahnya," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agus Purnomo kepada *Investor Daily*, pekan lalu.

Dia menambahkan, meski Kemenhub sudah menekan kontrak pengerjaan Pelabuhan Patimban bersama kontraktor serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun telah melakukan penandatanganan kontrak dengan kontraktor pembangunan jalan akses, pemerintah belum dapat melaksanakan *groundbreaking* Pelabuhan Patimban karena mesti menunggu proses pembebasan tanah.

Adapun progres pembebasan tanah hingga akhir Juli 2018 sebesar 60% dari total 372 hektare (ha) yang dibutuhkan. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, belum selesainya proses pengadaan tanah Pelabuhan

Patimban dikarenakan masih adanya sejumlah warga pemilik tanah yang belum menyepakati harga. Padahal, terang Budi, pemerintah sudah menyodorkan nilai tiga kali lipat dari harga pasaran sebelum ada rencana pembangunan Pelabuhan Patimban.

"Soal tanah, kami (melakukan pembebasan lahan) sesuai Undang-Undang (UU) No 2/2012. Kami diskusi secara baik, *soft*, menghitung harga pasar. Jadi harga itu sudah lebih baik daripada harga sebelumnya. Harga ini tiga kali lipat dari harga sebelumnya. Kalau ada protes-protes, ya kami berkomitmen melakukan ini sesuai UU," imbuh Budi.

Sesuai dengan penetapan lokasi (penlok), ada enam desa di dua kecamatan yang menjadi lokasi Pelabuhan Patimban. Lima desa, yakni Patimban, Kalentambo, Gempol, Pusakartu, dan Kotasari yang terletak di Kecamatan Pusakanagara. Sedangkan, satu desa lainnya adalah Pusakajaya yang terletak di Kecamatan Pusakajaya.

Proses pembebasan lahan dilakukan melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. Sedangkan anggaran pengadaan lahan disiapkan sekitar Rp 500 miliar dan dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

men Aset Negara (LMAN).

Budi menyampaikan, konsorsium pelaksana proyek fase 1 ini terdiri atas lima perusahaan, yakni Penta Ocean, Toa, dan Rinkai dari Jepang, serta PT PP Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk dari Indonesia.

"Kami harapkan pada awal bulan depan mulai konstruksi dan bisa dikerjakan dalam beberapa bulan. Insya Allah awal tahun depan atau Maret 2019 sudah bisa mengoperasikan *car terminal* dan *roro*," ungkap Budi.

Pelabuhan Patimban, menurut Menhub, sangat strategis karena bisa menjadi tumpuan bagi kawasan-kawasan industri di Jawa Barat hingga Jawa Tengah bagian barat. Pelabuhan Patimban pun dapat mendukung peran Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sehingga volume lalu lintas barang bisa dibagi.

"Dengan adanya Pelabuhan Patimban diharapkan tidak ada kemacetan lagi di Jakarta. Barang-barang yang biasa ke Tanjung Priok melalui Jakarta bisa dialihkan sebagian ke Patimban. Ini juga membuat kemudahan-kemudahan baru bagi konektivitas logistik dari dalam dan luar negeri," imbuh Budi.

Sementara itu, Agus Purnomo sebelumnya mengatakan, sebagai salah satu proyek strategis nasional, pembangunan Pelabuhan Patimban akan dilaksanakan dalam tiga fase. Tahapan konstruksi akan dimulai pada Agustus 2018, *soft opening* pada awal 2019, dan ditargetkan ketiga fase rampung secara keseluruhan pada 2027.

Pembangunan Pelabuhan Patimban dilaksanakan melalui pendanaan dari *official development assistance (ODA loan)* Pemerintah Jepang. Terdapat 10 paket pekerjaan yang terbagi menjadi dua fase. Agus menjelaskan, loan agreement yang dilaksanakan pada tahun lalu itu baru mencakup dua fase.

Dia menerangkan, pada pekerjaan fase 1, Kemenhub mendapat tugas mengerjakan tiga paket konstruksi, satu paket konsultan supervisi, dan satu paket konsultan pemilihan operator. Sedangkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) mendapatkan tugas mengerjakan satu paket konstruksi dan 1 paket supervisi.

Menurut dia, saat beroperasi pada 2019, Pelabuhan Patimban disiapkan dengan kapasitas 3,5 juta *twenty foot equivalent units (TEUs)* dan 382.000 kendaraan bermotor (CBU). Selanjutnya, pada tahap kedua, kapasitas pelayanan akan ditingkatkan menjadi 5,5 juta TEUs dan pada tahap ketiga akan meningkat hingga 7,5 juta TEUs. (tm)

Judul	<b>Sanitasi Masih Bermasalah</b>	Tanggal	Senin, 27 Agustus 2018
Media	Kompas (Halaman Utama)		
Resume	Masa tanggap darurat gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, berakhir hari Sabtu. Saat ini beralih menjadi fase transisi darurat ke pemulihan.		

# Sanitasi Masih Bermasalah

**LOMBOK UTARA, KOMPAS** — Masa tanggap darurat gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, berakhir hari Sabtu (25/8/2018). Saat ini beralih menjadi fase transisi darurat ke pemulihan. Namun, persoalan sanitasi di sejumlah posko pengungsian belum teratasi, terutama di dusun yang tidak terletak di tepi jalan raya. Pengungsi yang terjangkit diare dan infeksi saluran pernapasan akut terus bertambah.

Pantauan di sejumlah posko pengungsian di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara, Minggu (26/8), memperlihatkan kondisi sanitasi masih buruk. Minimnya ketersediaan air bersih, fasilitas mandi cuci kakus (MCK) yang belum memadai, serta tenda yang tak layak membuat warga rentan terkena penyakit.

Di Kecamatan Gangga, Lombok Utara, misalnya, banyak warga di pengungsian terpapar debu karena tidur beratap tenda terpal yang bagian sampingnya terbuka. Mereka terpaksa memanfaatkan saluran irigasi untuk keperluan MCK. Hal itu terjadi pada warga di pengungsian Dusun Karang Bedil, Desa Gondang.

Saharti (50), warga Dusun Karang Bedil, baru mengantarkan istrinya berobat ke Puskesmas Gangga akibat diare. "Pasokan air hanya cukup untuk wudu dan memasak. Untuk keperluan lain, seperti mandi dan buang air, kami lakukan di saluran irigasi," kata Saharti.

Cici Susantri (31), warga lain, menuturkan, anaknya, Anindya (2), terus buang air dan muntah. Ia sudah empat kali berobat ke Puskesmas Gangga dan didiagnosis menderita diare. "Sudah dua hari tidak mau makan, tetapi masih mau minum susu," kata Cici didampingi suaminya, M Anhar (33), di Puskesmas Gangga.

Menurut Baiq Willia, dokter di Puskesmas Gangga, warga yang berobat ke puskesmas umumnya menderita diare dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). ISPA ditandai dengan batuk dan pilek. "Setiap hari kami melayani 80-100 warga yang berobat. Mayoritas terkena diare dan ISPA, terutama anak-anak," katanya.

## Toilet kotor

Di posko pengungsian Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, warga tidak lagi menggunakan fasilitas MCK portabel karena bak penampung kotoran penuh dan meluap. Kondisi toilet rusak dan kotor. "Kami buang air ke sungai. Begitu juga untuk mandi. Di sini sering tidak kebagian air. Mungkin banyak tempat pengungsian butuh air," kata Rianto (38), seorang warga.

Di pengungsian yang dihuni sekitar 500 orang, hampir semua penghuni terserang penyakit, terutama anak-anak. Menurut Marlia (32), warga Desa Manggala, penyakit yang paling banyak

**>> BACA JUGA:**

## Labuhan Bajo Terdampak

**NUSANTARA/HLM 22**

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5)

Judul	<b>Pendanaan Infrastruktur</b>	Tanggal	Senin, 27 Agustus 2018
Media	Kompas (Halaman, 6)		
Resume	Para pemudik lebaran tahun ini telah merasakan adanya perbaikan kondisi jalan tol yang dapat mengurangi (belum mengeliminasi) penderitaan macet selama perjalanan.		

# Pendanaan Infrastruktur

Hotbonar Sinaga  
Dosen Fakultas Ekonomi UI 1973-2016

Para pemudik Lebaran tahun ini telah merasakan adanya perbaikan kondisi jalan tol yang dapat mengurangi (belum mengeliminasi) penderitaan macet selama perjalanan.

Pembangunan jalan tol yang agresif beberapa tahun terakhir adalah selanjutnya contoh pembangunan infrastruktur di Tanah Air yang layak diapresiasi. Dalam waktu 3,5 tahun terakhir kita telah berhasil membangun jalan tol sepanjang 536 kilometer (km). Selanjutnya rencana jalan tol Trans-Jawa dari Merak hingga Banyuwangi sepanjang total 1.150 km akan diwujudkan tahun 2019. Bayangkan penderitaan para pemudik jika pembangunan jalan tol gagal direalisasikan.

Untuk membangun infrastruktur termasuk pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan lain-lain diperlukan dana yang tidak sedikit, dalam periode 2015-2019 dibutuhkan dana Rp 4.769 triliun. Dari jumlah itu, 41,3 persen diserap APBN/APBD, 22,2 persen BUMN, dan 36,5 persen partisipasi swasta. Sepenuhnya kita menyadari manfaat luar biasa pembangunan infrastruktur yang bukan merupakan pilihan, melainkan kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakannya.

Realisasi pembangunan ini, selain menciptakan lapangan kerja, memenuhi asas keadilan pembangunan di seluruh Nusantara, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan berbagai manfaat lainnya, juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi (lihat China yang tumbuh rata-rata 7 persen per tahun setelah sukses membangun infrastruktur), baik secara sektoral, geografis, maupun nasional. Selain itu, akan menarik minat investor asing berinvestasi di dalam negeri dalam bentuk penanaman modal asing, bukan hanya investasi portofolio dalam bentuk surat berharga termasuk saham yang tak terjamin sustainabilitasnya.

Agresivitas ini berlanjut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 pada 20 Juli 2018 mengenai 224 Proyek Strategis Nasional. Begitu banyak proyek infrastruktur yang didominasi jalan tol (64 ruas), sarana dan prasarana transportasi seperti pembangunan bandara, kereta api plus pembangunan sejuta rumah, infrastruktur terkait sampah, kilang minyak, bendungan, dan lain-lain. Yang perlu diimplementasikan secara hati-hati adalah bagaimana merealisasikan pembangunan dan mengelola proyek, menerapkan tata kelola yang baik, dan manajemen risiko untuk menghindari berbagai bentuk penyimpangan ataupun kebocoran seperti kasus PLTU Riau.

Seorang anggota staf Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Margono, menulis dalam akun Facebook-nya, ada tiga jenis proyek infrastruktur. Pertama yang secara keuangan, dalam arti luas, tidak layak (*financially not feasible*), tetapi sangat diperlukan masyarakat, seperti pembangun-

an irigasi/bendungan, pendidikan, dan pembangunan fasilitas jalan jembatan, di daerah yang tengah berkembang. Yang jadi pertimbangan utama adalah analisis biaya-manfaat dan nilai tambah (*multiplier effect*) yang dapat diciptakan.

Jenis kedua adalah proyek yang sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah untuk membangunnya sehingga tak dapat diserahkan seluruhnya kepada pihak swasta. Contoh jenis proyek ini (yang tidak layak dari aspek bisnis/komersial), misalnya pengadaan sarana transportasi, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain-lain.

Yang ketiga, berbagai proyek yang secara komersial menguntungkan, semisal kawasan industri, kilang minyak, dan sebagainya. Proyek seperti ini dapat diserahkan dan ditangani/dikelola investor swasta, aset tetap dikuasai negara, dan investor memperoleh konsesi atau hak pengelolaan sampai jangka waktu tertentu.

## Skema pembiayaan

Ketiga jenis proyek infrastruktur tersebut dengan ciri-ciri berbeda perlu skema pembiayaan yang berbeda pula. Untuk jenis pertama, sumber pembiayaan berasal dari APBN atau APBD. Namun, pemerintah menyadari keterbatasan dana APBN sehingga dilakukan berbagai upaya pendanaan melalui pinjaman luar negeri dan penerbitan surat utang. Contoh proyek jenis ini adalah pembangunan MRT dan LRT di Jakarta dan di daerah lainnya.

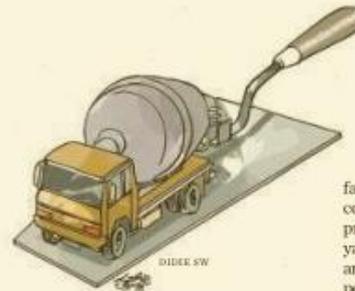
Untuk kategori proyek kedua, pemerintah menggandeng investor swasta baik dari dalam maupun luar negeri (investor asing) serta BUMN. Pendanaan disiapkan melalui kerja sama pemerintah dengan investor swasta atau *public private partnership*. Pemerintah sejak 2012 telah menyiapkan fasilitas (dana dukungan tunai infrastruktur) yang memberikan kepastian pihak investor swasta tak akan merugikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 223 Tahun 2012. Pemerintah tetap akan memperoleh penghasilan berupa pajak dan setelah periode konsesi berakhir sesuai perjanjian, pemerintah berhak menguasai proyek itu.

Proyek jenis ketiga, pendanaannya diserahkan kepada investor swasta sepenuhnya (termasuk asing tentunya) yang memungkinkan mekanisme *direct lending*. Investor harus menghitungkan dengan cermat besaran tingkat pengembalian modal proyek itu. Contohnya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan biaya 5,9 miliar dollar AS, 25 persen dipenuhi oleh konsorsium BUMN dan 75 persen pinjaman dari Bank Pembangunan China. Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah telah menciptakan berbagai terobosan dalam skema pembiayaan sehingga tidak tergantung dari anggaran pemerintah.

## Institusi yang terlibat

Partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur sudah dimulai sejak tahun 2000-an. Misalnya, pendirian Nusantara Infrastructure Tbk tahun 2006 yang sudah cukup banyak terjun dalam berbagai proyek sebagai investor merangkap sebagai pengembang. Proyek yang dibangun mulai dari jalan tol, pelabuhan, energi, hingga telekomunikasi.

Kemudian, Februari 2009, pemerintah



memdirikan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang bergerak di bidang pendanaan dan investasi proyek, jasa konsultasi, dan pengembangan proyek. Partisipasi dalam proyek cukup bervariasi, mulai dari pembangkit listrik (Tanjung Ugang, Gorontalo, Pekanbaru), jalan tol (Cikopo-Palimanan, Palembang-Indralaya), pembangunan terminal kontainer di Palaran Kaltim, hingga pembangunan Rumah Sakit Karangasem.

Sri Mulyani ikut serta melahirkan Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yang berdiri sejak Agustus 2010 dengan menjadi pemegang saham 30 persen. IIF juga didukung Bank Dunia melalui International Finance Corporation (IFC) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) serta beberapa lembaga multilateral. IIF sebagai katalisator pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia berfokus tak hanya pada pembiayaan, tetapi juga konsultasi kepada pemerintah dan swasta. Proyeknya mulai dari telekomunikasi, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, jalan tol, hingga sektor migas.

Beberapa rekasa dana penyertaan terbatas (RDPT) juga sudah diterbitkan untuk pembiayaan infrastruktur yang dikelola perusahaan Manajemen Investasi. Salah satunya pembangunan Bandara Kertajati yang telah diuji coba baru-baru ini.

Contoh lain, RDPT berbasis infrastruktur untuk jalan tol yang dibangun Waskita dan BUMN konstruksi lainnya, jalan tol Trans-Jawa, dan sebagainya. Selain RDPT, inovasi lain adalah penerbitan Surat Berharga Perpetual oleh PT PP Tbk untuk mendanai PLTU di Meulaboh, bekerja sama dengan Cipta Dana Assets Management dan PT CIMB Niaga Tbk.

Terobosan lain yang juga telah direalisasikan adalah pendirian Indonesia Infrastructure Guarantee Fund atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/Pii (Persero) pada akhir 2009. Perusahaan ini ikut mendukung pada tahap-tahap awal proses, termasuk monitoring manajemen proyek dan manajemen risiko (seperti risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dan penyesuaian tarif) serta pendampingan transaksi berbagai pembangunan jalan tol di Jawa, Kalimantan, Sulawesi Utara, serta proyek Palapa Ring dan PLTU di Batang, Jawa Tengah, proyek air minum di Umbulan dan Lampung dan banyak lagi yang tengah disiapkan perencanaannya, termasuk infrastruktur sosial.

Dalam waktu dekat Pii juga akan memberikan penjaminan proyek nonkerja sama pemerintah dengan badan usa-

ha/KPBU (*direct lending*) untuk BUMN.

Pemerintah, dalam hal ini Bappenas yang menyadari keterbatasan kemampuan APBN/APBD berinisiatif membentuk tim fasilitasi pemerintah untuk pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA) pada 2017. PINA menyediakan skema fasilitas yang bertujuan untuk mempercepat pembiayaan investasi swasta pada proyek infrastruktur strategis nasional yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran non-pemerintah dan didukung penuh oleh kebijakan pemerintah.

Sumber dana yang digunakan bersifat jangka panjang, antara lain dana pensiun, asuransi khususnya jiwa, *sovereign wealth fund* baik dalam maupun luar negeri. Sudah banyak proyek yang digarap, seperti jalan tol dengan Waskita Karya, pembangkit listrik dengan PP Energy, jaringan serat optik dengan PT LEN, dan kerja sama dengan Nusantara Infrastructure.

Akhir Maret 2018, dua anak BUMN, yaitu Bahana Capital Investa dan Danareksa Capital, bersama 27 BUMN lain yang bergerak di bidang *financial intermediary* telah menandatangani pembentukan Private Investment Fund. Untuk melengkapi dukungan pengembangan proyek infrastruktur, kehadiran *investment fund* ini akan menjadi salah satu solusi pendanaan infrastruktur, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana BUMN, termasuk dana pensiunnya untuk berinvestasi pada proyek atau portofolio efek.

## Koordinasi pembangunan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Indonesia kerap terkendala karena kurang efektifnya koordinasi antara pemangku kepentingan yang beragam seperti pihak pemerintah dengan pihak swasta. Bervariasinya pemangku kepentingan dengan tanggung jawab masing-masing yang berbeda tak jarang mengakibatkan tertundanya pembangunan proyek.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, tahun 2014 pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPI) melalui peraturan presiden dengan ketua Menko Perekonomian. Komite yang merupakan *point of contact* dalam implementasi koordinasi untuk "*debottlenecking*" proyek strategis dan proyek prioritas nasional dan sejauh ini sudah mengoordinasikan lebih dari 250 proyek nasional.

Kekhawatiran akan meningkatnya defisit APBN karena membiayai pembangunan infrastruktur kurang tepat. Penggunaan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur juga masih terkendala. Yang perlu diwaspadai dan diantisipasi adalah pengaruh penggunaan komponen impor yang dapat meningkatkan kebutuhan devisa dalam mata uang asing dan bisa saja memengaruhi nilai tukar rupiah yang saat ini cenderung melemah.

Dari paparan di atas, pemerintah berada pada jalur yang benar dalam menjalankan kebijakan agresivitas pembangunan infrastruktur plus berbagai terobosan dengan beberapa catatan penting seperti dikemukakan di atas.

Judul	Bangun Rumah Tahan Gempa	Tanggal	Senin, 27 Agustus 2018
Media	Kompas (Halaman, 14)		
Resume	Penanganan dampak gempa bumi di Lombok memasuki tahap pemulihan. Saatnya warga di kawasan itu mendirikan rumah yang lebih kuat dengan teknik konstruksi tahan gempa.		

# Bangun Rumah Tahan Gempa

Penanganan dampak gempa bumi di Lombok memasuki tahap pemulihan. Saatnya warga di kawasan itu mendirikan rumah yang lebih kuat dengan teknik konstruksi tahan gempa.

Ahmad Arif

Masa tanggap darurat bencana gempa bumi Lombok, Nusa Tenggara Barat, dinyatakan berakhir dan kini masuk tahap pemulihan. Kini saatnya masyarakat Lombok membangun rumah-rumah lebih kuat karena gempa bumi ibarat tamu yang bisa kembali bertandang kapan saja.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, tahapan tanggap darurat di Lombok berakhir pada Sabtu (25/8/2018). "Sekalipun tanggap darurat berakhir, hingga saat ini pengungsi masih memerlukan bantuan logistik," ujarnya.

Di tengah upaya pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, proses pemulihan, terutama pembangunan kembali rumah, harus mulai dilakukan. Mengutip data BNPB, total rumah rusak di Lombok 73.843 unit dengan jumlah pengungsi 390.529 orang.

Saat bertemu dengan para pengungsi di lapangan Kantor Bupati Lombok Utara, Senin (13/8/2018), Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah pusat telah menganggarkan bantuan untuk pembangunan rumah rusak Rp 50 juta per keluarga.

"Saya hanya ingin pesan, membungunya akan diawasi Pak Gubernur kemudian akan diberikan bimbingan oleh Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nanti membungunya harus rumah yang tahan gempa. Namanya sistem Risha. Jadi kalau ada gempa, itu tidak goyah," kata Presiden, seperti dilansir keterangan tertulis dari Biro Press Sekretariat Presiden.

Secara teknis, risiko gempa bumi bisa dikurangi dengan memperkuat konstruksi bangunan. Sejumlah ahli konstruksi di Indonesia juga menemukan teknik konstruksi tahan gempa, salah satunya Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang dikembangkan oleh Penelitian dan Pengembangan Pusat Perumahan (Puskim) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Sistem Risha kami kembangkan sejak tahun 2002 dan patennya telah kami daftarkan sejak Februari 2004," kata Kepala Puskim Arif Soharudin, yang juga merupakan ketua tim peneliti Risha.

Menurut Arif, Risha yang memiliki Sertifikat Merek IDMO00096604 awalnya dikembangkan untuk membantu program pembangunan satu juta rumah rakyat yang saat itu dicanangkan Presiden Megawati Soekarnoputri. "Akhirnya kami menemukan teknologi pembangunan rumah yang bisa selesai dibangun hanya satu hari, tetapi memenuhi aspek tahan gempa, ramah lingkungan, dan harganya terjangkau," ungkapnya.

## Teruji gempa

Teknologi Risha diluncurkan pada 20 Desember 2004 dan seminggu kemudian terjadi gempa serta tsunami Aceh. Sejumlah

## Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha)

Risha terdiri atas tiga panel yang masing-masing berbobot kurang dari 47 kg. Mutu beton pada panel Risha adalah 24 Mpa atau setara dengan K 275. Di dalam panel berisi rangka baja berdiameter 8 mm dan 6 mm. Sistem sambungan antarpanelnya menggunakan baut berdiameter 12 mm dan plat setebal 3 mm.



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

lembaga bantuan internasional akhirnya menggunakan rancangan Risha tersebut untuk pembangunan kembali di Aceh.

"TOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) telah membangun lebih dari 10000 rumah bantuan di Aceh dengan teknologi Risha. Kemudian, Unicef (Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak) menggunakan untuk membangun sekolah di 200 lokasi," kata Arif.

Ketika terjadi gempa bumi di Pidie Jaya, Aceh, tahun 2016, rumah-rumah bantuan dengan teknologi Risha di kawasan itu terbukti masih utuh. "Selain tahan gempa, rumah Risha didesain bisa tahan 50 tahun, dibandingkan rumah konvensional yang umur pakainya 20 tahun," katanya.

Teknologi Risha, kata Arif, juga digunakan di Yogyakarta setelah gempa bumi pada tahun 2006 dan sejumlah daerah bencana lain di Indonesia. Bahkan, Risha juga dibangun di Lombok pada tahun 2010, yang difungsikan sebagai Balai Dusun Akar-Akar dan Sekolah Adat Boyan di Desa Karang Bajo, Lombok Utara. Dua bangunan itu masih utuh setelah rangkaian gempa mengguncang Lombok.

## Rumah tumbuh

Pada prinsipnya, menurut Arif, Risha merupakan sistem pembangunan rumah tumbuh bongkar pasang dengan meng-



gunakan tiga panel beton tulangan pracetak untuk kolom, balok, dan sloof. Masyarakat tinggal memasang panel kerangka tersebut menggunakan baut. Sementara untuk dinding, bisa diisi sendiri dengan batu bata, batako, papan, ataupun bambu. "Selama ini kelemahan dasar bangunan rakyat adalah tulangan yang lemah dan detail sambungan buruk sehingga tidak tahan gempa. Itu pula yang kami temukan saat survei dampak gempa di Lombok," kata Arif.

Dengan menyediakan tulangan pabrikan, mutu tulangan untuk rumah rakyat diharapkan bisa lebih dikontrol. "Kita tinggal mengawasi kualitasnya di tiga workshop milik swasta yang siap memproduksi panel Risha di Lombok," ucapnya.

Untuk rumah tipe 36 di Lombok, total harga panel tulangannya Rp 23 juta. Masyarakat bisa menggunakan sebagian dana bantuan Rp 50 juta untuk membeli tulangan Risha. Untuk dinding, bisa memakai material be-

kas rumah lama. "Kami akan memberi panduan penyambungannya," kata Arif.

Selain itu, para penyintas gempa bumi dapat bekerja di workshop atau bengkel yang telah didirikan di Lombok sehingga bisa mendapatkan pemasukan selama masa pemulihan, sebagaimana diterapkan di Yogyakarta pasca-gempa. Melalui proses itu, para penyintas juga bisa belajar dan mengetahui prinsip konstruksi yang baik.

Keunggulan lain sistem Risha adalah fleksibilitasnya. Karena sifatnya bongkar pasang panel Risha cocok menjadi rumah tumbuh dan dapat dikembangkan menjadi rumah dua lantai.

Meski Risha dianggap praktis, penyintas di Lombok juga bisa memilih cara lain, misalnya dengan membangun rumah tembok biasa asalkan konstruksinya benar. "Kami telah menyebarkan banyak brosur tentang tata cara membangun rumah sederhana tahan gempa," katanya.

Selain itu, masyarakat bisa membangun rumah tahan gempa menggunakan teknik yang ditemukan para ahli Indonesia lain. Contohnya, ahli konstruksi bangunan rakyat, Teddy Boen, telah mengembangkan teknik penguatan tembok secara sederhana dan relatif murah. Caranya, dinding bata dilapisi kawat ayam di dua sisinya lalu dipelster dengan campuran semen dan pasir setebal 2 sentimeter. Teknik itu dikenal dengan pelapisan ferro-

cement (Kompas, 8 Mei 2015).

Guru Besar Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Sarwidi juga mengembangkan teknik konstruksi tahan gempa yang dikenal sebagai sistem Barrataga, singkatan dari Bangunan Rakyat Tahan Gempa. Prinsip dasar Barrataga adalah memberi pengikat-pengikat praktis yang biasanya terbuat dari beton untuk memperkuat bangunan. Selain itu, ia memberi lapisan pasir di bawah fondasi bangunan untuk meredam dampak guncangan gempa bumi (Kompas, 13 Juli 2015).

Sarwidi mengatakan, semua model bangunan mempunyai kelebihan dan kekurangan. "Para peneliti akan selalu berupaya membuat inovasi agar bangunan rumah tahan gempa semakin populer dengan prinsip biayanya terjangkau, semakin kuat, dan makin singkat pembangunannya. Misalnya, kami sekarang mengembangkan Barrataga semi-konvensional yang akan menggunakan panel pracetak juga," katanya.

Apa pun pilihan bentuk dan desain rumah yang akan dibangun nantinya, masyarakat Lombok harus lebih mengedepankan teknologi membangun yang tahan gempa. Jika dulu nenek moyang mereka membangun rumah tradisional dari bambu dan kayu yang terbukti tahan gempa, rumah-rumah baru yang hendak dibangun harusnya lebih kuat.

Judul	<b>Aturan Hunian Direvisi</b>	Tanggal	Sabtu, 25 Agustus 2018
Media	Kompas (Halaman, 13)		
Resume	Pemerintah memutuskan untuk merevisi peraturan tentang hunian berimbang.		

# Aturan Hunian Direvisi

Pembangunan hunian berimbang akan direvisi menjadi boleh berbeda kabupaten atau kota, bahkan provinsi. Selama ini aturan itu menghambat penyediaan rumah.

**JAKARTA, KOMPAS** — Pemerintah memutuskan untuk merevisi peraturan tentang hunian berimbang. Nantinya, setelah direvisi, pembangunan hunian berimbang oleh pengembang rumah komersial akan diperbolehkan tidak dalam satu kabupaten atau kota, bahkan diperbolehkan beda provinsi.

"Peraturan menteri tentang hunian berimbang yang selama ini menjadi masalah adalah harus dibangun satu hamparan. Nanti akan diperbolehkan membangun rumah tapak di luar kabupaten, bisa satu provinsi atau bisa satu pulau. Itu bedanya," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pembangunan rumah oleh pengembang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Permukiman, terutama Pasal 34, 35, 36, dan 37. Lebih lanjut, hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Disebutkan, konsep hunian berimbang mesti diwujudkan pengembang dalam satu hamparan dalam satu kabupaten atau kota, kecuali DKI Jakarta dalam satu provinsi.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang Pasal 9A Ayat 2 menyebutkan, rasio hunian berimbang adalah 1:2:3. Artinya, setiap membangun 1 rumah mewah, pengembang mesti membangun 2 rumah menengah dan 3 rumah sederhana.

Ayat 6 di aturan yang sama menyebutkan, pembangunan rumah umum dapat dilakukan di luar hamparan asal tetap dalam

kabupaten atau kota yang sama, kecuali DKI Jakarta.

Menurut Khalawi, selama ini Peraturan Menteri Perumahan Rakyat yang mengatur tentang pembangunan dalam satu kabupaten atau kota menjadi salah satu hambatan dalam penyediaan rumah. Dengan revisi tersebut, pengembang rumah komersial tetap diwajibkan untuk membangun rumah umum meski tidak harus dalam satu kabupaten atau kota. Namun, revisi hanya berlaku untuk rumah tapak. Adapun pembangunan hunian vertikal tetap harus dilaksanakan dalam satu kabupaten atau kota.

## Masih digodok

Revisi tersebut masih digodok pemerintah. "Soal sanksi (bagi pengembang) untuk hunian berimbang juga akan dihilangkan. Saat ini masih berupa rancangan peraturan menteri. Akan segera

diundangkan karena ini yang jadi masalah," kata Khalawi.

Secara terpisah, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menyambut positif rencana pemerintah tersebut. "Semua aturan kami harap difokuskan untuk pemenuhan rumah rakyat. Pengembang pada prinsipnya mengikuti aturan pemerintah yang sifatnya bisa diaplikasikan," kata Soelaeman.

Menurut Soelaeman, pembangunan rumah di satu kabupaten atau kota tidak bisa diterapkan karena terkendala sejumlah hal, di antaranya lahan yang terbatas dan harga yang mahal. Padahal, pemerintah berharap, dengan hunian berimbang, pasokan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat teratasi.

Menurut data pemerintah, angka kekurangan rumah berdasarkan kepemilikan 11,4 juta unit, sedangkan angka kekurangan

rumah berdasarkan kepenghuniannya 7,7 juta unit. Diperkirakan tambahan kebutuhan rumah 800.000 unit per tahun.

Soelaeman menambahkan, jika pengembang besar ikut membangun rumah subsidi sama dengan mematkan pengembang kecil yang tersebar di daerah. Sebab, rumah subsidi kebanyakan dibangun pengembang kecil.

Dengan revisi peraturan tersebut, kolaborasi antara pengembang besar dan pengembang kecil untuk membangun rumah subsidi bisa dijalankan secara lebih masif. Pengembang besar bisa menyediakan lahan. Sementara yang membangun adalah pengembang kecil. Kolaborasi seperti itu telah diwujudkan anggota REI di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat.

"Bagi pengembang besar perlu kepastian ini sebagai bagian dari konsep hunian berimbang," ujar Soelaeman. (NAD)

Judul	<b>Membangun Rumah, Membangun Bangsa</b>	Tanggal	Sabtu, 25 Agustus 2018
Media	Kompas (Halaman, 13)		
Resume	Memperingati Hari Perumahan Nasional, 25 Agustus, sejenak merenungkan soal pemenuhan perumahan di Indonesia.		

## Membangun Rumah, Membangun Bangsa

Memperingati Hari Perumahan Nasional, 25 Agustus, sejenak merenungkan soal pemenuhan perumahan di Indonesia. Papan termasuk salah satu dari tiga kebutuhan pokok manusia, yakni sandang, pangan, dan papan.

Hari Perumahan Nasional ditetapkan dalam Kongres Perumahan Rakyat di Bandung, 25-30 Agustus 1950. Kongres dihadiri peserta, antara lain, 63 kabupaten dan kotapraja, 4 provinsi, wakil Jawatan Pekerjaan Umum, utusan organisasi, pengurus partai, dan tokoh perorangan. Peristiwa itu mendasari penerbitan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46 Tahun 2008 tentang Hari Perumahan Nasional.

Dalam kongres itu, Mohammad Hatta menyampaikan pemikirannya bahwa pembangunan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia memerlukan proses panjang. Dengan demikian, perlu persiapan kelembagaan yang matang.

Perumahan bukan sekadar masalah fisik. Pada hakikatnya, rumah adalah tempat berlindung bagi keluarga. Dalam arti yang lebih luas, rumah adalah tempat membina generasi. Jika rumah tidak sehat, produktivitas masyarakat tidak maksimal.

Kenyataannya, lebih dari 80 persen pembangunan rumah di Indonesia dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Mereka membangun secara bertahap atau dikenal dengan konsep rumah tumbuh karena disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Namun, beberapa proyek properti di beberapa tempat yang diinisiasi pengembang terbukti turut mendorong pertumbuhan sebuah kota baru.

Sementara itu, menurut catatan pemerintah, angka kekurangan rumah berdasarkan kepemilikan sebanyak 11,4 juta unit, sedangkan angka kekurangan rumah berdasarkan kepenghuanian 7,7 juta unit. Adapun jumlah rumah tidak layak huni 3,4 juta unit. Diperkirakan tambahan kebutuhan rumah 800.000 unit per tahun.

**Pada hakikatnya, rumah adalah tempat berlindung bagi keluarga. Dalam arti yang lebih luas, rumah adalah tempat membina generasi.**

Menyediakan hunian yang layak kian menantang. Lahan terbatas, sedangkan jumlah manusia terus bertambah. Hal ini menjadi masalah yang mendasar. Tingkat urbanisasi yang tinggi membuat perebutan lahan di perkotaan kian ketat. Praktik spekulasi lahan turut melambungkan harga lahan.

Semua hal itu mengerek harga hunian, baik tapak maupun vertikal di perkotaan.

Harga hunian kian mahal sehingga tidak lagi terjangkau masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah. Akibatnya, masyarakat kelompok ini hanya mampu membeli hunian di pinggir kota, bahkan di luar kota. Dampaknya, mereka harus menanggung ongkos transportasi yang semakin besar.

Bagi pengembang, membeli lahan di perkotaan memerlukan modal besar. Dengan besarnya investasi yang telah dikeluarkan itu, menjadi hal yang kian sulit untuk menjual produk rumah dengan harga murah.

Di titik ini, tingkat jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses rumah atau hunian masih rendah. Intervensi pemerintah untuk meningkatkan daya beli melalui beberapa skema pembiayaan baru bisa mencakup sebagian kelompok masyarakat. Itu pun kebanyakan bagi yang bekerja di sektor formal.

Sebenarnya, pemerintah bukannya tidak mampu mendukung penyediaan rumah dengan harga terjangkau. Dukungan yang bisa dikerjakan antara lain memaksimalkan fungsi sebagai regulator untuk berbagai sektor dan pemangku kepentingan di sektor perumahan, yakni dalam pengadaan tanah, perizinan, konstruksi, pembiayaan, dan pemasaran.

Perlu konsep penyelenggaraan perumahan yang jelas di atas lahan yang disiapkan jauh-jauh hari. Dengan cara itu, tanah tak lagi dijadikan instrumen spekulasi.

Setahap demi setahap, persoalan kekurangan rumah di masyarakat dapat diselesaikan. Masyarakat bisa tenang memenuhi kebutuhan dasar mereka, yakni papan.

(NORBERTUS ARYA DWIANGGA)

Judul	<b>Ekonomi Wisata Menggeliat</b>	Tanggal	Sabtu, 25 Agustus 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 17)		
Resume	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Purbalingga, Jawa Tengah menargetkan mampu menyedot pendapatan dari sektor pariwisata objek wisata Gua Lawa Purbalingga		

# Ekonomi Wisata Menggeliat

*Objek-objek wisata baru bermunculan di daerah dan mampu menumbuhkan geliat perekonomian masyarakat.*

**LILIEK DHARMAWAN**  
 (lilie@measindo.com)

**D**INAS Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Purbalingga, Jawa Tengah, menargetkan mampu menyedot pendapatan dari sektor pariwisata objek wisata Gua Lawa Purbalingga (Golaga) hingga Rp1,3 miliar. Apalagi objek wisata tersebut baru saja direnovasi. Hingga pekan ini, pendapatan Dinporapar telah mencapai Rp934 juta lebih dari objek wisata Golaga.

Kepala Bidang Pariwisata Dinporapar Purbalingga, Prayitno, mengungkapkan Golaga baru saja dibenahi dengan mempercantik bagian dalam gua dan sudah rampung sebelum Lebaran.

"Setelah renovasi rampung, jumlah pengunjung meningkat. Pada pekan ketiga Agustus, jumlah pendapatan telah mencapai Rp934 juta lebih. Padahal dalam APBD 2018 hanya dipatok Rp650 juta. Kami memprediksi jumlah pendapatan hingga akhir tahun menembus Rp1,3 miliar," jelas Prayitno, kemarin.

Menurutnya, meningkatnya pengunjung dan pendapatan Golaga terjadi setelah adanya revitalisasi kawasan gua berupa penambahan lampu-lampu serta pembenahan lingkungan sekitar.

"Jumlah pengunjung meningkat signifikan pada saat liburan Lebaran yakni melonjak hingga 120%. Pada libur Lebaran 2017, jumlah

pengunjung mencapai 18 ribu lebih, sedangkan tahun ini melonjak hingga 44 ribu wisatawan," tambahnya.

**"Sektor pariwisata di Dlingo dalam tiga tahun ini mulai mengalami perubahan luar biasa. Dlingo yang dulunya sepi, sekarang menjadi ramai."**

**Jartri Bayubroto**  
 Camat Dlingo

## Objek wisata baru

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan denyut nadi perekonomian di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, objek wisata di kawasan itu diperindah dan ditingkatkan layanannya.

Camat Dlingo, Jartri Bayubroto, mengatakan setelah pariwisata di wilayah itu tumbuh dan berkembang, tercipta banyak lapangan kerja baru.

"Sektor pariwisata di Dlingo dalam tiga tahun ini mulai mengalami perubahan luar biasa. Dlingo yang dulunya sepi, sekarang jadi ramai. Tanah dulu tidak laku, sekarang jadi rebutan," jelasnya. (AU/OL/N-3)

Saat ini bermunculan objek-objek wisata baru yang menjadi tujuan favorit wisatawan. Di wilayah Dlingo, terutama di Desa Manganan, terdapat beberapa spot wisata, seperti Hutan Pinus, Puncak Becici, Puncak Pengger, Desa Wisata Kaki Langit, dan Seribu Batu Songgolangit.

Meski demikian, dia berharap agar akses menuju objek wisata di Kecamatan Dlingo dapat ditingkatkan. Saat ini akses jalan yang sudah dibangun ialah di objek wisata Kebun Buah Manganan dan Hutan Pinus.

Masih terkait dengan dunia pariwisata, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan berbagai kegiatan yang bertujuan demi perdamaian berdampak baik terhadap pemulihan daerah pariwisata pascabencana.

Pastika menyampaikan hal itu saat menerima panitia Gema Perdamaian Ke-16 di Kantor Gubernur Bali pada Kamis (23/8).

Ia mengatakan semua elemen masyarakat khususnya para pelaku ekonomi pariwisata sepatutnya bersyukur dengan adanya gerakan-gerakan perdamaian.

"Kita harus akui bahwa pesan-pesan perdamaian seperti ini membuat kepercayaan wisatawan meningkat sehingga recovery lebih cepat seperti yang dulu terjadi pascabaham Bali," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Panitia Gema Perdamaian Ke-16, Kadek Adnyana, mengatakan tahun ini Gema Perdamaian akan dimelebrakan dengan lomba, antara lain duta perdamaian, lomba film pendek, blog, dan digital. (AU/OL/N-3)



**TIDAK TERDAMPAK GEMPA:** Sejumlah wisatawan berada di pantai kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, akhir pekan lalu. Kawasan wisata Mandalika tidak terdampak bencana gempa dan tetap ramai dikunjungi, baik oleh wisatawan asing maupun domestik.

## Keraton Surakarta Harus Dibuka

RATUSAN kerabat Trah Dalam Dinasti Mataram Surakarta mendesak pihak Raja Paku-buwono XIII untuk segera membuka keberadaan Keraton Surakarta demi kepentingan pendidikan dan pariwisata.

Mereka menggelar unjuk-rasa di depan Kori Kemahdungan Keraton Surakarta, kemarin, sambil menggelar tiga spanduk besar bertuliskan 'Mohon Keraton Segera Dibuka untuk Pariwisata dan Pendidikan'. Spanduk lainnya bertuliskan 'Keraton bukan Milik Pribadi', juga 'Keraton Milik Dinasti Mataram, Harus Dijaga dan Dilestarikan'.

Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, GKR Wandansari atau akrab dipanggil Koes Murtiyah, menyeru kepada Raja Paku Buwono XIII untuk segera mengfungsikan kembali keraton demi kepentingan pendidikan dan pariwisata.

"Keraton Surakarta adalah aset bangsa, bukan milik pribadi. Oleh karena itu, harus segera difungsikan kembali untuk kepentingan pariwisata dan pendidikan," tegas Koes Murtiyah yang disambut dengan kor teriakan 'buka, buka, buka'.

Demo itu berlangsung tertib

dan singkat. Mereka tidak ingin memaksakan kehendak untuk membuka secara paksa karena tidak ingin memperkeruh suasana.

Namun, ratusan orang dari trah dinasti Mataram Surakarta itu sangat menghendaki keraton yang sudah cukup lama tertutup dari masyarakat umum sejak adanya perseteruan internal segera membuka diri dan mendukung program Pemkot Surakarta, khususnya dalam pengembangan pariwisata dan pendidikan.

Konflik antarketurunan PB XII sudah berlangsung cukup lama, dan hingga kini belum

ada tanda-tanda perdamaian.

Sebelum muncul unjuk rasa, Lembaga Dewan Adat dalam rangka Hari Raya Idul Adha telah menggelar grebeg besar yang diberangkatkan dari Sitihiinggil Keraton Surakarta. Gunung grebeg yang berisi hasil bumi dan makanan itu, seusaai diberi doa di Masjid Agung Surakarta, diperebutkan masyarakat yang ingin mendapatkan berkah.

"Kami melakukan hajat dalam grebeg besar Idul Adha untuk meluruskan sejarah. Sejak dulu, grebeg selalu dimulai dari Sitihiinggil," ujar KP Eddy Wirabhumi. (WJ/N-3)

Judul	Desember Jembatan Holtekamp akan Beroperasi	Tanggal	Sabtu- Minggu, 25-26 Agustus 2018
Media	Investor Daily (Halaman, 6)		
Resume	Menteri BUMN menyatakan bahwa jembatan Holtekamp di papua diharapkan sedah dapat beroperasi pada Desember 2018.		

# Desember, Jembatan Holtekamp akan Beroperasi

JAYAPURA - Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan bahwa Jembatan Holtekamp di Papua diharapkan sudah dapat beroperasi pada Desember 2018. Pengoperasian jembatan ini akan meningkatkan konektivitas di wilayah tersebut.

"Saya harapkan Desember ini sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," kata Menteri BUMN Rini Soemarno ketika meninjau pembangunan Holtekamp di Jayapura, Papua, Jumat (24/8).

Menurut Rini, bangsa Indonesia seharusnya bangga dengan pembangunan Jembatan Holtekamp yang merupakan jembatan lengkung kreasi anak bangsa sendiri. Apalagi, jembatan ini dibangun dengan teknologi canggih dan memiliki bentangan 732 meter, serta dibuatnya di Papua.

Dia juga menerangkan, jembatan lengkung panjang ini merupakan hasil sinergi dari berbagai BUMN, yakni ben-

tangan bajanya dibuat di PT PAL Surabaya untuk kemudian ditarik ke Jayapura sehingga dapat diselesaikan oleh beragam BUMN konstruksi lainnya.

Dalam rangka pengiriman tersebut juga telah memecahkan sejumlah rekor dari Museum Rekor Indonesia, yaitu atas rekor Pengiriman Rangka Baja Pelengkung Bagian Tengah secara Utuh dengan Jarak Terjauh, serta atas rekor Pengangkatan dan Pemasangan Rangka Baja Jembatan dalam Bentuk Utuh Terpanjang.

Proyek Jembatan Holtekamp itu sendiri merupakan kerja sama pemerintah pusat dan pmda setempat yang bertujuan sebagai salah satu solusi permasalahan kepadatan penduduk di kota Jayapura. Dengan pembangunan Jembatan Holtekamp itu rencananya bakal mempersingkat waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju distrik Muas Tami dan PLBN Skouw.

Selain itu, Jembatan Holtekamp

juga memiliki manfaat sebagai sarana pendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua, serta menjadikannya sebagai sarana landmark atau ikon baru Papua.

Kontrak pembangunan jembatan holtekamp senilai Rp856,72 miliar telah ditandatangani oleh konsorsium kontraktor yang terdiri dari PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Hutama Karya, dan PT Nindya Karya. Konstruksi bentang utama jembatan sepanjang 433 meter tersebut direncanakan selesai pada 2018.

Selain pembangunan bentang utama yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, jembatan ini juga akan disertai pengerjaan jalan akses masing-masing untuk arah Hamadi (250 meter) dan arah Holtekamp (596,2 meter) yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kotamadya Jayapura serta jembatan pendekat (297 meter) dengan dana dari Pemerintah Provinsi Papua. (ean/ant)

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Sabtu- Minggu, 25-26 Agustus 2018
Media	Investor Daily (Halaman, 6)		
Resume	Jalan Layang Tol		



### **Jalan Layang Tol**

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan layang tol Jakarta-Cikampek di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (24/8). Jalan layang sepanjang 36 kilometer dengan anggaran Rp16,36 triliun tersebut hingga saat ini baru mencapai 35 persen dan diperkirakan rampung pada Maret 2019.

Judul	<b>Pendataan Rumah di Lombok Barat Rampung pada September</b>	Tanggal	Sabtu- Minggu, 25-26 Agustus 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 5)		
Resume	Pemerintah kabupaten Lombok Barat menargetkan pendataan rumah yang rusak rampung pada 25 September mendatang		

# Pendataan Rumah di Lombok Barat Rampung pada September

Verifikasi berjalan lambat lantaran harus dilakukan bersama aparat desa.

Maya Ayu Puspitasari  
maya.puspitasari@tempo.co.id

**JAKARTA** – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menargetkan pendataan rumah yang rusak rampung pada 25 September mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat, I Made Arthadana, menyebutkan proses verifikasi rumah rusak diperkirakan selesai pada 10 September. Setelah itu dilanjutkan dengan validasi hingga 25 September.

Ia menuturkan, perlu tambahan waktu untuk proses validasi karena melihat kondisi tenaga verifikasi. Sejauh ini, ada 309 orang yang menjadi tenaga verifikasi rumah rusak di semua wilayah yang terkena dampak bencana. Per hari, ia menerima kurang dari seribu rumah terverifikasi. "Berarti rata-rata hanya tiga rumah per orang per hari. Jauh dari asumsi awal satu orang 30 rumah per hari," ucapnya kemarin.

Gempa beruntun yang mengguncang Lombok dalam tiga pekan terakhir menyebabkan 57.614 rumah di Lombok Barat rusak. Sebanyak 23.007 di antaranya rusak berat, 14.820 rumah rusak sedang, dan 19.787 rumah rusak ringan. Rentetan gempa besar itu juga merusak 461 tempat ibadah, 50 fasilitas kesehatan, 175 fasilitas

pendidikan, 7 jembatan, dan 294 kios atau toko.

Sejauh ini, Dinas Pekerjaan Umum Lombok Barat telah melakukan verifikasi terhadap 8.255 rumah yang terdiri atas 3.850 rumah rusak ringan, 2.139 rusak sedang, dan 2.266 rusak berat. "Itu masih jauh dari target keseluruhan," kata Made. Untuk itu, ia berharap semua tenaga verifikasi bekerja lebih maksimal.

Salah seorang verifikasi, Suhaemi, mengatakan rekannya telah bekerja maksimal. Bersama tiga rekannya, verifikasi yang diperbantukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat itu baru mampu memverifikasi belasan rumah dalam sehari. Suhaemi menyebutkan salah satu kesulitannya dalam memverifikasi adalah harus dibarengi dengan aparat pemerintah desa.

Kepala Subdirektorat Perencanaan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Wing Prasetyo berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tetap bisa menuntaskan verifikasi pada hari ini. "Kami berharap tetap bisa diselesaikan saat tanggap darurat ini. Jangan masalah diteruskan di masa transisi, biarpun masih memungkinkan," ujar Wing.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan proses rehabilitasi perlu segera dilakukan setelah masa

tanggap darurat bencana selesai hari ini. Menurut dia, perlu waktu satu bulan persiapan sebelum mulai membangun rumah penduduk yang rusak. Pembangunan rumah-rumah penduduk diperkirakan berlangsung selama enam bulan.

Tugas membangun kembali rumah yang rusak diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rencananya, rumah baru tersebut menggunakan teknologi yang tahan gempa hingga 8 skala Richter. Dana bantuan dan material bangunan diperkirakan dapat mulai didistribusikan bulan depan.

● **AKHYAR M. NURI (LOMBOK) | VINDEY FLORENTIN**



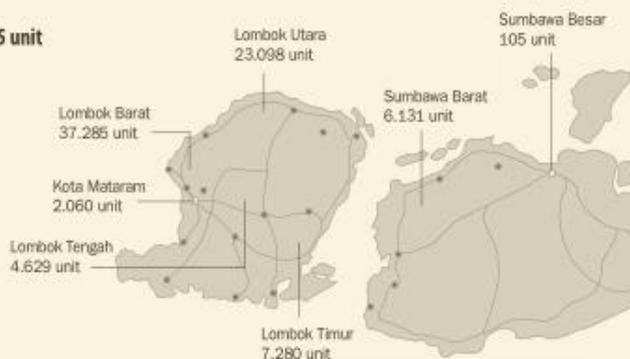
Seorang warga membersihkan puing-puing rumahnya yang roboh pascagempa di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, NTB, 20 Agustus lalu.

## Paling Parah

Rentetan gempa berturut-turut di Lombok, Nusa Tenggara Barat, menghancurkan puluhan ribu rumah penduduk. Dari semua wilayah yang terkena dampak bencana, kerusakan paling banyak terjadi di Kabupaten Lombok Barat.

### Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Total  
**76.765 unit**



**Bangunan lain yang rusak**

Tempat ibadah	461 unit
Fasilitas kesehatan	50 unit
Fasilitas pendidikan	175 unit
Jembatan	7 unit
Kios/toko	294 unit

**Posko Pemerintah Kabupaten Lombok Barat**

Rusak berat	23.007 unit
Rusak sedang	14.820 unit
Rusak ringan	19.787 unit
Total	57.614 unit

**Bangunan yang sudah diverifikasi di Lombok Barat:**

Rumah sebanyak	8.255 unit:
- Rusak ringan	3.850 unit
- Rusak sedang	2.139 unit
- Rusak berat	2.266 unit

● **MAYA AYU PUSPITASARI | SUMBER: POSKO PENANGANAN BENCANA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DAN BNPD**

Judul	Aturan Hunian Direvisi	Tanggal	Senin, 27 Agustus 2018
Media	Kompas (Halaman, 18)		
Resume	Pembangunan hunian berimbang akan direvisi menjadi boleh berbeda kabupaten atau kota bahkan provinsi.		

# Aturan Hunian Direvisi

Pembangunan hunian berimbang akan direvisi menjadi boleh berbeda kabupaten atau kota, bahkan provinsi. Selama ini aturan itu menghambat penyediaan rumah.

**JAKARTA, KOMPAS** — Pemerintah memutuskan untuk merevisi peraturan tentang hunian berimbang. Nantinya, setelah direvisi, pembangunan hunian berimbang oleh pengembang rumah komersial akan diperbolehkan tidak dalam satu kabupaten atau kota, bahkan diperbolehkan beda provinsi.

"Peraturan menteri tentang hunian berimbang yang selama ini menjadi masalah adalah harus dibangun satu hamparan. Nanti akan diperbolehkan membangun rumah tapak di luar kabupaten, bisa satu provinsi atau bisa satu pulau. Itu bedanya," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pembangunan rumah oleh pengembang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Permukiman, terutama Pasal 34, 35, 36, dan 37. Lebih lanjut, hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Disebutkan, konsep hunian berimbang mesti diwujudkan pengembang dalam satu hamparan dalam satu kabupaten atau kota, kecuali DKI Jakarta dalam satu provinsi.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang Pasal 9A Ayat 2 menyebutkan, rasio hunian berimbang adalah 1:2:3. Artinya, setiap membangun 1 rumah mewah, pengembang mesti membangun 2 rumah menengah dan 3 rumah sederhana.

Ayat 6 di aturan yang sama menyebutkan, pembangunan rumah umum dapat dilakukan di luar hamparan asal tetap dalam

kabupaten atau kota yang sama, kecuali DKI Jakarta.

Menurut Khalawi, selama ini Peraturan Menteri Perumahan Rakyat yang mengatur tentang pembangunan dalam satu kabupaten atau kota menjadi salah satu hambatan dalam penyediaan rumah. Dengan revisi tersebut, pengembang rumah komersial tetap diwajibkan untuk membangun rumah umum meski tidak harus dalam satu kabupaten atau kota. Namun, revisi hanya berlaku untuk rumah tapak. Adapun pembangunan hunian vertikal tetap harus dilaksanakan dalam satu kabupaten atau kota.

## Masih digodok

Revisi tersebut masih digodok pemerintah. "Soal sanksi (bagi pengembang) untuk hunian berimbang juga akan dihilangkan. Saat ini masih berupa rancangan peraturan menteri. Akan segera

diundangkan karena ini yang jadi masalah," kata Khalawi.

Secara terpisah, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menyambut positif rencana pemerintah tersebut. "Semua aturan kami harap difokuskan untuk pemenuhan rumah rakyat. Pengembang pada prinsipnya mengikuti aturan pemerintah yang sifatnya bisa diaplikasikan," kata Soelaeman.

Menurut Soelaeman, pembangunan rumah di satu kabupaten atau kota tidak bisa diterapkan karena terkendala sejumlah hal, di antaranya lahan yang terbatas dan harga yang mahal. Padahal, pemerintah berharap, dengan hunian berimbang, pasokan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat teratasi.

Menurut data pemerintah, angka kekurangan rumah berdasarkan kepemilikan 11,4 juta unit, sedangkan angka kekurangan

rumah berdasarkan kepenghunan 7,7 juta unit. Diperkirakan tambahan kebutuhan rumah 800.000 unit per tahun.

Soelaeman menambahkan, jika pengembang besar ikut membangun rumah subsidi sama dengan mematikan pengembang kecil yang tersebar di daerah. Sebab, rumah subsidi kebanyakan dibangun pengembang kecil.

Dengan revisi peraturan tersebut, kolaborasi antara pengembang besar dan pengembang kecil untuk membangun rumah subsidi bisa dijalankan secara lebih masif. Pengembang besar bisa menyediakan lahan. Sementara yang membangun adalah pengembang kecil. Kolaborasi seperti itu telah diwujudkan anggota REI di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat.

"Bagi pengembang besar perlu kepastian ini sebagai bagian dari konsep hunian berimbang," ujar Soelaeman. (NAD)